

# ***Proceeding***

## **Presentasi Hasil Penelitian Hibah Program Desentralisasi, Sentralisasi dan Hibah Internal Unpas Tahun 2014**

**Kampus Unpas IV, Setiabudhi  
23 Desember 2014**



**Bidang Ilmu Sosial**

**Penyelenggara :  
Lembaga Penelitian (Lemlit)  
Universitas Pasundan  
Bandung**





## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Cartono “Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Calon Guru Biologi Melalui Pengembangan Model Asesmen Otentik Yang Menilai Keterampilan Pemecahan Masalah Dalam Kegiatan Praktek Lapang Terpadu”. .....	1
Mia Nurkanti “Pengembangan Model Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Dalam Upaya Pembinaan Profesionalisme Guru Berkelanjutan”. .....	11
Bambang Heru Purwanto “Pembinaan Keprofesionalan Guru Bersertifikat Pendidik Melalui Lesson Study Pada Satuan Pendidikan Menengah YPDM pasundan cimahi” .....	22
R. Poppy Yaniawati, M.Pd “Peningkatan Daya Matematika (mathematical power) Melalui Pengembangan Bahan Ajar Dan Asesmen Berbasis E-Learning”. .....	32
H. Bana G. Kartasasmita “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis E-Learning Untuk Meningkatkan KEMAMPUAN Pemecahan Masalah Matematis Siswa Smk” .....	43
Rosikin Wk,M.Sn. “Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan Pengatin Khas Pesisir Kerawang”. .....	54
Ramlan “Eksistensi Atraksi Kesenian “ Sisingaan “ Sebagai Pesona Religius Dan Pariwisata Budaya Jawa Barat”. .....	61
Dheni Harmaen “ Perkembangan Konsep Estetik Kria Anyam (Handicrafts) Di Indonesia Pada Abad 2” .....	70
Teddy Hikmat Fauzi “Development of Business Potency in Small and Medium Enterprise Creative Industry Sector in Bandung City Based Triadic Entrepreneurship, Intellectual Property and Design” .....	84



Rd.Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. <i>Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka "Pembaharuan Proses Peradilan : Studi terhadap perempuan pelaku tindak pidana Dalam kasus kdrt"</i> .....	87
Nurhasan, <i>"Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sungai Untuk Mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi Di Jawa Barat"</i> .....	120
Yayan Mulyana <i>"Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran Produk Rajut Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Ukm Rajut Binongjati Di Kota Bandung"</i> .....	140
Dr. Undang Juju, SE. MP. <i>"Implementasi Strategi Model Kerja Sama Umk Guna Membangun Kemampuan Bersaing Dan Efektifitas Pemasaran Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Pada Sentra Batik Trusmi Cirebon"</i> .....	158
Dra. IMAS SUMIATI, M.Si <i>"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Trans Metro Bandung"</i> .....	170
Dr. Tete Saefudin, SE., M.Si <i>"Analisis Rantai Pasokan Komoditas Florikultura Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat"</i> .....	182





## Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sungai Untuk Mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi Di Jawa Barat

Oleh:

Nurhasan, Yudistiro, Wiwi Yuhaeni  
e-mail: hasan\_albila@yahoo.co.id

### Abstract

Enforcement of environmental laws in its observance fact facing many obstacles, challenges. and loaded with a variety of interests that are not easily negotiated. This condition is most apparent in solving environmental problems that occur as a result of the activities company in West Java. The problem arises when the company additional the function a certain river, from the traditional function as a means of irrigation and the family needs a new function as a means of transporting water waste industry. Because of this problem the people and stakeholders of West Java reacted strongly and so does the stakeholder. There are many dispute settlements made to guarantee the balance of interests between the business community and the government in order to empower the people of West Java. This article using juridical-empirical approach, legal analysis, anti techniques of literature study. The expected result is the formulation of a model of community collaboration and integrated industrial management as a form of a comprehensive solution to the environmental problems that is Business is not only oriented on physical mitigation but also social mitigation.

Keywords : Industri, terintegrasi, sungai, limbah, model.

### A. PENDAHULUAN

Pengaturan lingkungan hidup berdasarkan paradigma lama yaitu bahwa lingkungan hidup harus diatur oleh undang-undang (hukum) nasional, ternyata terdapat indikasi tidak dapat diterapkan di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sekitar 41.483.729 jiwa (hasil survey social ekonomi daerah tahun 2007) memiliki banyak industri, bentang alam, dan kondisi masyarakatnya yang berkarakter khusus, memikul peranan yang besar dan berat sebagai Daerah Penyangga ibu kota Republik Indonesia (Jakarta).

Pengaturan pemanfaatan sungai tertentu (bagian dan lingkungan hidup) sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri di Jawa Barat menuntut adanya paradigma baru atau setidaknya lingkungan penyesuaian dalam pengaturan lingkungan hidup yaitu : Hukum harus menyesuaikan dengan karakteristik alam dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Selain dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberi solusi berkeadilan terhadap perubahan paradigma peruntukan sungai, dan peruntukan sungai secara tradisional sebagai sarana pengairan dan kebutuhan keluarga menjadi juga berfungsi sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri. Fakta menunjukkan bahwa 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat saat ini dalam kondisi atau dalam status mutu air baku tercemar berat. 7 (tujuh) DAS tersebut yaitu: 1) Sungai Cisadane; 2) Sungai Ciliwung 3) Sungai Cileungsi; 4) Sungai Citarum 5) Sungai Cilamaya; 6) Sungai Cimanuk; dan 7) Sungai Citanduy. Penyebabnya adalah terutama diduga akibat perusahaan-perusahaan (industri) membuang limbah cair industrinya secara langsung ke sungai-sungai tersebut dengan tidak memenuhi standar pengelolaan limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa sebagian keanekaragaman hayati di DAS Citarum terancam punah, diantaranya 15 jenis ikan, 5 jenis mamalia, 7





jenis burung, dan 8 jenis amfibi. DAS Citarum merupakan yang paling luas dan paling panjang. Luas DAS Citarum mencapai 7.187 kilometer persegi, panjangnya mencapai 269 kilometer untuk sungai utama, dan jika dihitung dengan anak-anak sungainya mencapai 14.346 kilometer. Hulu Sungai Citarum terletak di mata air Gunung Wayang. Secara keseluruhan DAS Citarum meliputi 9 Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Sungai Citarum bermuara di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Muara Gembong, terletak sekitar 64 kilometer dan pusat kota Bekasi. Ada juga yang menyebutkan di Tanjung Karawang, Kabupaten Karawang. DAS lainnya yang termasuk luas yaitu DAS Cisadane termasuk luas yaitu DAS Cisadane, DAS Cimanuk, DAS Citanduy, dan DAS Cimanuk. Persoalan semua DAS di Jawa Barat, hampir serupa, yaitu lahan kritis cukup luas (lebih dari 1.250 kilometer persegi), langganan banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, sedimentasi waduk, penegakan hukum belum tegas, partisipasi masyarakat masih kurang, koordinasi masih lemah, dan berpotensi konflik jika stakeholders tidak bersatu. Sungai Citarum (salah satu DAS yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai studi kasus) mempunyai kedudukan penting karena merupakan penyuplai air di Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jati Luhur, yang menjadi pusat penghasil listrik (PLTA) untuk kebutuhan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sungai Citarum merupakan sumber air irigasi untuk area pertanian terutama pesawahan seluas 300 ribu hektar. Sungai Citarum juga merupakan Kabupaten minimum untuk masyarakat Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan DKI Jakarta. Di sepanjang DAS Citarum banyak bendungan industri kecil, menengah dan besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran di dalam maupun di sekitar DAS, sedangkan akibat bagian hulu, terjadi kerawanan akibat penjarahan lahan dan alih fungsi menjadi

areal pertanian, terutama dijadikan sentra penanaman sayuran dan peternakan. Urgensi atau keutamaan penelitian ini berkaitan dengan kegiatan industri yang dalam prosesnya menghasilkan limbah cair yang dibuang secara langsung ke sungai. Sungai telah dimanfaatkan untuk pembuangan akhir Limbah Cair Industri yang dampaknya memberi tekanan pada aspek fisik (dalam arti luas) dan aspek sosial (dalam arti luas). Pemanfaatan sungai untuk kegiatan industri tidak cukup hanya dengan mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi juga harus memperhatikan mitigasi (perbaikan) dampak lingkungan fisik (normalisasi, rekognisi, kompensasi) dan mitigasi sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (community development). Kegiatan industri dalam pelaksanaannya memerlukan ruang yang berarti terkait dengan masalah pemanfaatan lingkungan. Sungai sebagai bagian dan lingkungan hidup telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan industri, yaitu difungsikan sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri. Optimalisasi partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam kegiatan industri penting karena bagi masyarakat Jawa Barat berdasarkan kearifan tradisionalnya bahwa sungai merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Uraian di atas mengindikasikan perlunya kajian holistik pemanfaatan sungai tertentu sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri untuk mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi, sehingga perusahaan dalam jangka waktu tertentu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa mendapat tekanan, gangguan, atau tuntutan dari masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) Meneliti, mengkaji dan menyusun Konstruksi Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) tentang pemanfaatan sungai tertentu sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri di Jawa Barat; dan 2) Menerapkan Konstruksi Model Pengelolaan Industri Terintegrasi dalam pengaturan pemanfaatan sungai tertentu sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri di Jawa Barat. Adapun metode pendekatan yang



digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Empiris. Hasil dan penelitian ini diproyeksikan bermanfaat : a) Bagi Dunia Usaha, mendapatkan jaminan kepastian hukum dan terhindar dan tuntutan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta dalam jangka waktu tertentu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku; b) Bagi Masyarakat, mendapatkan bantuan manajemen dan dana dan perusahaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (community development); c) Bagi Pemerintah, memperoleh kajian holistik sebagai bahan menyusun peraturan daerah dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah; dan d) Bagi Aparatur Penegak Hukum, adanya kepastian hukum depenalisasi pemanfaatan sungai-sungai tertentu. Pemanfaatan Sungai Secara Normatif, Filosofis, dan Ekologis Rumusan otentik tentang sungai terdapat di lain ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991, yaitu : "Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dan mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan." Ketentuan tentang penguasaan sungai dalam PP No. 35 Tahun 1991 masih mencerminkan karakteristik pemerintahan Onge Baru yang sentralistik. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) berikut : "(1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri. Sejalan dengan demokratisasi yang berkembang sungai era reformasi, konsep penguasaan sungai mengalatni kemajuan sebagaimana terkandung maknanya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu : (1) Sumber daya air dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (2)

Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan /atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang undangan; dan (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya insih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2004. Sungai sebagai bagian dan sumber daya air Walaupun hak penguasaannya ada pada negara, namun dalam penggunaannya harus ditujukan untuk mewujudkan keimamkuran yang optimal bagi masyarakat pada umumnya dan lebih khusus bagi masyarakat sekitar sungai. Ketentuan tersebut juga telah mengakomodasi pemerintah daerah untuk turin serta berperan dalam penyelenggaraan penguasaan sungai sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. flak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu juga telah mendapat pengakuan keberadaannya menurut hukum, sehingga dalam penyenggaraan penguasaan sungai titik dibenarkan adanya upaya mengesampingkan hak-hak tersebut. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 4 UU No. 7 Tahun 2004, sungai mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup. Dan ekonomi yang pengelolaannya harus berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas Sungai sebagai bagian dan ekosistem yang di dalamnya hidup beragam jenis flora dan fauna yang bersifat endemis, serta kondisi aliran fisiknya yang path umumnya bersifat untas daerah, maka ruang lingkup pengelolaannya terbagi ke dalam beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya melakukan konservasi sumber daya air sungai secara optimal yang pada akhirnya dapat dicapai suatu kondisi terjaganya keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sungai. Untuk mempertahankan dan memulihkan





kualitas air sungai dapat dilakukan melalui pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemarannya secara profesional. Ketentuan Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2004 dengan tegas melarang setiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sumber air (sungai) dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air. Pemanfaatan sungai perlu diimbangi dengan upaya perlindungan dan pelestariannya dan kemungkinan terjadinya kerusakan atau gangguan terutama yang disebabkan oleh tindakan manusia, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendekatan biologi, geologi, fisika, kimia, sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya tersebut penting dilakukan karena harus dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan. Pendayagunaan sungai sangat dimungkinkan, kecuali pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, namun dalam penyelenggaraannya harus dilakukan secara terpadu, adil dan optimal, baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama agar berhasil guna dan berdaya guna.

Kegiatan usaha industri sangat penting dengan upaya pengembangan sumber daya air sungai, karena dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi biasanya membutuhkan ketersediaan air baku dalam jumlah besar. Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sungai harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, pengembangan air permukaan pada sungai perlu dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sungai yang bersangkutan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena karakteristik dan fungsi sungai pada daerah yang sama berbeda dengan daerah yang lainnya. Ketentuan Pasal 52 UU No. 7 Tahun 2004 dengan tegas melarang setiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan air. Pengendalian upaya pencegahan, dilakukan melalui upaya penanggulangan, dan pemulihan. Upaya

pencegahan harus lebih diutamakan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Jika terpaksa perlu ditempuh upaya penanggulangan, maka penanggulangannya dapat dilakukan dengan mitigasi bencana, sedangkan upaya pemulihan dilakukan oleh pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan sungai untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dalam ekosistem sungai. Pengelolaan sungai mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah (Daud Silabhi, 2003) yang memerlukan keterpaduan tindakan untuk menjaga kelangsungan fungsi sungai, dan oleh karenanya fungsi koordinasi mutlak diperlukan dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan stakeholders. Ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan sungai sebagai bagian dan sumber daya air yang secara normatif telah tegas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan terkait harus diperhatikan ketika akan mengadakan pengaturan tentang pemanfaatan sungai untuk tempat pembuangan limbah cair industri. Secara filosofis, kekuasaan mutlak atas alam semesta berada pada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai bagian dari alam semesta mendapat kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup di bumi dan mengelola alam semesta dengan petunjuk-Nya yang telah disampaikan-Nya melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia untuk mengelola alam semesta bersifat sementara (temporary), terbatas (resiricreci), amanah (mandate), kolektif (collective), dan untuk kemakmuran (prosperity). Sejalan dengan paradigma relativitas kekuasaan yang dimiliki manusia, bangsa Indonesia meneguhkan cita-cita membangun negara hukum sebagaimana dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi (Bagir Manan, 1999 : 2). Lebih lanjut ia menjelaskan, dimensi politik dalam negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan yang menjelma dalam paham negara berkonstitusi, pembagian atau pemisahan kekuasaan, kemerdekaan



kekuasaan kehakiman, dan jaminan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dimensi hukum dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi dalam negara hukum berupa kewajiban negara melalui pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial. Doktrin John Locke memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran negara hukum terutama yang menyangkut dimensi politik, yaitu pembagian kekuasaan. John Locke bereaksi keras terhadap absolutisme raja pada zamannya, dan kemudian ia mengajukan konsep dalam rangka merasionalkan dan mensistematiskan fungsi-fungsi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi (I.M.Rasjidi, 1984 : 174), yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Ia mengakui bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan kekuasaan (*balancing of power*). Paradigma relativitas kekuasaan dalam perkembangannya mampu mendorong pertumbuhan demokrasi, termasuk demokratisasi di dalam setiap tungsifungsi kekuasaan negara. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih maju di Indonesia pasca era reformasi 1998 merupakan perwujudan demokratisasi fungsi kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam rangka merealisasikan amanat UUD 1945. Pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (*grondwet*) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keanekaragaman adalah sifat alamiah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di tiap keanekaragaman ada kekhususan dengan ciri-ciri khas yang tidak dapat dipaksakan harus sama dengan yang lainnya. Masyarakat Jawa Barat dan lingkungan alamnya memiliki kekhasan yang tidak dapat dipersamakan dengan masyarakat dan lingkungan alam daerah segala Masyarakat Jawa Barat dengan segala

kekhasannya memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Selama ini, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Jawa Barat belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat. Secara filosofis, upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam konteks pengaturan pemanfaatan sungai untuk tempat pembuangan akhir Limbah Cair industri di Provinsi Jawa Barat dapat disejalkan dengan Aliran Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mendalilkan bahwa manusia ini akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan (Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, 2000 : 64).

Ketika dalil tersebut digunakan path bidang hukum, maka standar penilaian etis yang digunakan yaitu mendasarkan pada ukuran bahwa baik buruknya peraturan perundang-undangan ditentukan oleh apakah peraturan perundang-undangan tersebut mendasarkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atau tidak. Jadi, peraturan perundang-undangan yang banyak memberikan kebahagiaan path bagian terbesar masyarakat Jawa Barat akan dinilai oleh masyarakat Jawa Barat sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Secara ekologis atau ekonomi alam yang bermakna melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi, bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini, cenderung bersifat antroposentris, yaitu melihat permasalahan lingkungan dan sudut kepentingan manusia, sehingga ekologi yang dibutuhkan adalah ekologi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya (Otto Soemarwoto, 1997 : 22). Manusia yang otch Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai akal dan pikiran mempunyai kemampuan mendayagunakan lingkungan hidupnya. Faktor teknologi yang digunakan dalam mendayagunakan lingkungan hidup tersebut menentukan besaran manfaat (nilai ekonomi) dan dampak yang ditimbulkannya. Semakin tinggi kemampuan teknologi yang digunakan, cenderung semakin tinggi pula





manfaat (nilai ekonomi) yang dapat dinikmati oleh manusia, baik kuantitas maupun kuantitasnya. Namun demikian, dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya dapat dipastikan akan semakin besar pula. Strategi dan teknik pengelolaan dampak lingkungan hidup menjadi semakin penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan efektivitasnya. Di dalam ekosistem sungai terdapat unsur jasad hidup (biotic) dan tidak hidup (abiotic). Unsur jasad hidup terdiri dari beragam jenis hewan dan tumbuhan dan mulai yang berukuran sangat kecil hingga yang besar dan berada dalam sistem jaring-jaring kehidupan (mata rantai makanan). Unsur yang tidak hidup seperti air, tanah, batu, pasir, dan lain-lain berfungsi sebagai sarana penunjang untuk berlangsungnya kehidupan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Tingkat kualitas air sungai menentukan dapat atau tidaknya beragam jenis hewan dan tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Untuk menentukan kualitas air sungai, apakah dalam kondisi baik atau buruk, terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan, diantaranya yaitu: 1) Parameter fisika; dan 2) Parameter kimia (Ilfendi Effendi, 2003: 50-128). Parameter fisika dapat menggunakan indikator cahaya; suhu; kecerahan dan kekeruhan; warna; konduktivitas (daya hantar listrik); padatan total, terlarut dan tersuspensi; dan salinitas. Parameter kimia dapat menggunakan indikator (derajat keasaman); potensi redoks (reduksi dan oksidasi); oksigen terlarut; karbon dioksida; amoniak; kesadahan, dan bahan organik. Pemantauan kualitas air sungai secara berkala, jujur, dan profesional penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai, sehingga kegiatan industri yang dilakukan oleh manusia tidak mengorbankan lingkungan hidup. Tujuan yang harus diwujudkan yaitu industri tetap berjalan dan kualitas lingkungan hidup selalu dalam kondisi prima.

Berdasarkan konsep ekologi manusia, terdapat dua hal penting yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu: a) pemanfaatan sumber daya alam; dan b) pengelolaan dampak lingkungan hidup. Dalam merealisasikan kedua hal tersebut, harus dipersepsikan bahwa baik pemanfaatan

sumber daya alam maupun pengelolaan dampak lingkungan hidup merupakan kepentingan manusia yang sama derajat kepentingannya. Hasil kegiatan industri dapat dimanfaatkan untuk mendorong derajat kemakmuran manusia. Namun demikian, dalam pemanfaatannya tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup, karena kualitas lingkungan hidup yang prima sangat diperlukan juga oleh manusia dalam menunjang kehidupannya. Dan konsep ekologi manusia tersebut dikembangkanlah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen Indonesia untuk berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mengelola lingkungan hidupnya, termasuk di dalamnya proses industrialisasi yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dan kerangka pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan (Daud Silalahi, 1996). Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan Limbah Cair yang dihasilkan dan kegiatan industri adalah bahwa Limbah Cair tersebut tidak boleh terakumulasi di alam karena dapat mengganggu siklus materi dan nutrisi. Pembuangan Limbah Cair tersebut harus dibatasi pada tingkat yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pengelolaan industri harus diintegrasikan dengan prinsip, kaidah, dan norma yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya air, kesehatan, lingkungan sosial budaya, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, komitmen yang kuat dari pihak perusahaan (industri) pada pelaksanaan Mitigasi Fisik dan Mitigasi Sosial menjadi prasyarat untuk penerapan Pengelolaan Industri Terintegrasi, serta tentu dengan dukungan yang kuat pula dari masyarakat (stakeholders) dan pemerintah.





## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris berorientasi pada kajian holistik yang dalam prosesnya disiplin ilmu hukum mendapat bantuan disiplin ilmu terkait, misalnya : ekonomi, politik, sosial-budaya, biologi, geologi, kimia, fisika. Analisis terhadap obyek penelitian dilakukan melalui analisis hukum. Teknik pengumpulan data, selain melalui studi kepustakaan, juga dilakukan survei (observasi) lapangan di lokasi penelitian dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan diantaranya: Cost-Benefit Analysis (CBA).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Industri di Jawa Barat Dalam Pela Industri Nasional Berdasarkan hasil pembahasan dengan para perna ngku kepentingan, ditetapkan produk unggulan Jawa Barat, yaitu industri kreatif dan Industri telernatika. Industri kreatif yaitu industri yang bersumber dan kreativitas, keahlian, dan talenta individu yang berpeluang meningkatkan lapangan kerja melalui penciptaan dan komersialisasi kekayaan intelektual. Di Jawa Barat terdapat banyak Kawasan Industri, dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagaimana terlampir.

Dalam rangka rnewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, seria inerevitalisasi indusini nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Telah tersusun 35 Road Map (pela panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu: Buku I. Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster industri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petro kimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Perawatan Umum, 6) Klaster Industri Mesin Perawatan Produk Tekstil, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki. 2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (t2 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster

Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Endustni Karet dan Banang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Ternak, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kenas, t2) Klaster Industri Pengolahan Susu. 3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian. 4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elek tronika, 2) Klaster Lndustn Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya. 5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatil Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni. 6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Baru Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik lias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan. Untuk kondisi di Jawa Barat, dalam rangka mengimplementasikan 35 Road Map (peta panduan) tersebut di atas, konsep kebijakan pengembangan industrinya akan dijelaskan di bawah ini, sebagaimana dipaparkan oleh Gubernur Jawa Barat pada acara Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun 2012-2013 di Gedung Sate, Bandung. 17 Desember 2012, pada Gambar 1 sebagairna terlampir. Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional memiliki potensi yang besar, diantaranya dalam beberapa aspek sebagai berikut : 1) Jumlah penduduk terbanyak (44.286.519 jiwa); 2) Pusat kegiatan industri manufaktur dan strategis nasional; 3) Instalasi vital nasional (pendidikan, litbang, dan hankam) diantaranya berkelas dunia; 4) Berbatasan dengan ibu kota negara; 5) Memiliki tiga





Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan dua PKN-P; 6) Memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks; 7) Memiliki Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam. Kontribusi Jawa Barat terhadap Nasional. diantaranya : 1) Berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 14, 33%; 2) Kontribusi terhadap PDB sektor industri manufaktur sebesar 60%; 3) Kontribusi PMA Jawa Barat terhadap Nasional sebesar 34,46%; 4) Menyumbang produksi beras nasional sebesar 17,76%; 5) Provinsi produsen komoditi ekspor nasional, ke AS sebesar 18,4% dan ke Jepang sebesar 12,52%. Selain dari itu, kontribusi Jawa Barat terhadap regional Jawa Bali, yaitu : 1) Lintasan utama arus regional barang dan penumpang Sumatra-Jawa-Bali; 2) PMDN tertinggi di Jawa-Bali; 3) Penyedia listrik dengan kapasitas daya terpasang 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT Geotermal 1.061 MW, Lainnya 1.652 MW; 4) Luas kawasan hutan terbesar di Jawa-Bali sebesar 1,04 Juta Ha; 5) Memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS); 6) Daerah tujuan wisata; 7) Debit air permukaan 81 milyar M3 per tahun dan air tanah 150 Juta M3 per tahun. Sebagai daerah penyangga terhadap ibu kota Negara, kontribusi Jawa Barat diantaranya : 1) Penyedia air baku untuk DKI Jakarta; 2) Penyedia bahan pangan untuk DKI Jakarta; 3) Penyedia lahan dan infrastruktur pendukung untuk DKI Jakarta. Pembangunan industri yang dilaksanakan di Jawa Barat pada dasarnya merupakan bagian integral dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang disejajarkan juga dengan RPJPN dan RPJMN 2005-2025 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2007. Dalam MP3EI tersebut, khusus untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa difokuskan pada kegiatan ekonomi utama makanan, minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain dari itu, terdapat pula aspirasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama sistem senjata (alutsista). Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional, dengan strategi mengembangkan industri yang mendukung pelestarian daya dukung air dan lingkungan,

Untuk kondisi Jawa Barat telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dan pihak Pemenintah, Pernenintah Daerah Provinsi, Pernerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik melalui penyebaran angket di sural kabar daerah. melaksanakan open house serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui media lainnya seperti website. Memperhatikan pemaparan tersebut di atas, tampak jelas bahwa ke depan Pertumbuhan, pengembangan, dan pembangunan industri di Jawa Barat akan terus tumbuh, berkembang, dan maju. Namun demikian, pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan industri tersebut tidak terelakkan memberi tekanan atau dampak terhadap kuantitas dan kualitas tata ruang lingkungan hidup yang harus disikapi secara bijaksana dan berkeadilan. Pemanfaatan Sungai Sebagai Sarana Pembuangan Limbah Cair Industri Dan Dampaknya Pengaturan baru tentang pengelolaan dan pemanfaatan Sungai secara khusus telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai salah satu peraturan pelaksana dan Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Selain dan itu, sebelumnya telah ada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaran Air. Saat ini telah ada PP yang iebih komprehensif dan untas sektoral, yaitu PP No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dan banyaknya kegiatan manusia yang memanfaatkan keberadaan dan fungsi sungai sebagai salah satu sumber daya air, maka kegiatan industry merupakan salah satu kegiatan yang paling besar pengaruhnya terhadap baik atau buruknya kualitas air sungai. Jawa Barat sangat kaya dengan



DAS, tidak kurang dan 40 DAS melintasi wilayah Jawa Barat yang dikelompokkan ke dalam 6 Wilayah Sungai (WS), yaitu: 1) WS Ciliwung - Cisadane; 2) WS Cisadea - Cibareno; 3) WS Citarum; 4) WS Cimanuk - Cisanggarung; 5) WS Citanduy dan 6) WS Ciwulan - Cilaki. Saat ini, kondisi sungai-sungai tersebut sangat memprihatinkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari bagian hulu, tengah, hilir, hingga muara. Penurunan fungsi dan kualitas ekosistem sungai berpotensi menjadi ancaman bencana dan malapetaka bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2010, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Barat yaitu 53.44 berada pada peringkat 23 dan 33 provinsi di Indonesia, sedangkan Indeks Pencemaran Sungai yaitu 23,08. Pada artikel ini, sebagai studi kasus peneliti akan memfokuskan pada kondisi DAS Citarum sebagai daerah aliran sungai terpenting dan terbesar di Jawa Barat, yang alirannya melintasi mulai dari bagian hulu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan bermuara di Kabupaten Karawang. Hampir seluruh kategori industri, baik industri kecil, industri menengah, dan apalagi industri besar yang ada di daerah tersebut, telah memanfaatkan DAS Citarum sebagai sarana untuk membuang limbah industrinya. Untuk upaya pengendaliannya ada 2 (dua) instansi pemerintah yang terlibat langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu: 1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat; dan 2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Mekanisme pengendaliannya yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, secara garis besar dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu: a) Mekanisme perizinan; b) Mekanisme pelaporan secara mandiri oleh perusahaan (industri) ke BPLHD; c) Pemantauan langsung oleh BPLHD maupun DPSDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan d) Mekanisme Non Litigasi dan Litigasi

### Mekanisme Perizinan

Upaya Pengendalian melalui mekanisme perizinan, misalnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut: Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009: (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan. Berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2009: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2009: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang





mudah diketahui oleh masyarakat. Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009: (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2009: Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain dari ini, untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009. Untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria Wajib Amdal, wajib memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan 35 UU No. 32 Tahun 2009. Pengaturan yang lebih teknis tentang Izin Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No 27 Tahun 2012 yang menggantikan PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. PP No. 27 Tahun 2012 tersebut disebut lebih komprehensif karena di dalamnya mengatur tentang Amdal, UKLUPL, dan Izin Lingkungan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi terkait sehingga bersifat lintas sektoral. Dalam proses penyusunan dokumen Amdal yang disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Dokumen AMDAL di dalamnya mencakup 3 unsur, yaitu: 1) Kerangka Acuan; 2) Andal; dan 3) RKI-RPL. Penyusunan dokumen AMDAL wajib menggunakan pendekatan studi tunggal, atau terpadu, atau kawasan. Pendekatan studi tunggal dapat dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan dan/atau kewenangan pembinaan dan/atau pengawasan berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. Jika merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan serta kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) instansi, maka wajib menggunakan pendekatan studi terpadu. Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, tertetap dalam satu kawasan, wajib menggunakan pendekatan studi kawasan. Proses penyusunan dokumen Amdal harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Dapat melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta melalui konsultasi publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Pedoman yang lebih teknis tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal dan izin Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PMNLH) RI No. 17 Tahun 2012.

b) Mekanisme Pelaporan Secara Mandiri Oleh Perusahaan (Industri) Upaya pengendalian melalui mekanisme pelaporan secara mandiri (self monitoring) oleh perusahaan ke BPLHD setempat dimaksudkan sebagai metode pembinaan dengan memperlakukan perusahaan (industri) sebagai subyek hukum yang dalam operasional kegiatannya sejak awal pendirian telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak akan melakukan tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh tentang bagaimana sebuah perusahaan menyusun laporan pengelolaan limbah di perusahaannya yang kemudian dilaporkan ke BPLHD setiap bulan. Saat mekanisme pelaporan tersebut telah dapat dilakukan secara online melalui jaringan internet dengan format yang sudah ditetapkan oleh BPLHD. Dengan memperhatikan contoh data laporan-laporan dan perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah masuk ke BPLHD, pada



satu sisi sebenarnya pada umumnya pihak perusahaan sudah patuh mengikuti prosedur pelaporan pengetolaan limbah di perusahaannya, namun path sisi yang lain, pihak perusahaan belum bersungguh sungguh dalam mengatasi kualitas limbah perusahaannya yang masih rendah yang pada umumnya Tidak Memenuhi Baku Mutu Beban. Dapat dibayangkan bagaimana akibatnya, ketika timbah cair industri yang kualitasnya rendah tersebut langsung digelontorkan ke DAS Citarum. Dengan kondisi obyektif seperti itu, maka dapat difahami jika kemudian masyarakat mengungkapkan aspirasinya dalam media massa atau berunjuk rasa menyatakan bahwa mutu air DAS Citarum rusak berat dan mengancam kelangsungan hidup beragam makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem DAS Citarum termasuk manusia di dalamnya. Bahkan hingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan. DAS Citarum sebagai terah aliran sungai yang terdiri atas dua atau lebih ekosistem, pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu untuk mencapai pembangunan DAS secara berkelanjutan. Makna keterpaduan mencakup tiga dimensi, yaitu: 1) dimensi sektoral, artinya perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar seior atau instansi pemerirnah baik secara horizontal maupun vertikal; 2) dimensi keilmuan, artinya pengelolaan DAS Citarum harus dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, misalnya melibatkan berbagai bidang ilmu terkait, ilmu ekologi, ekonomi, hukum, teknik, sosiologi, dan bidang ilmu lainnya yang relevan, karena di dalam DAS terdalin sistem alam dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis; dan 3) dimensi ekologis, artinya DAS pada dasarnya tersusun dari berbagai ekosistem (hutan, kebun, sawah, sungai, permukiman, dan lain-lain) yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling bergantung. Tidak berdiri sendiri. c) Mekanisme Pemantauan Langsung Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, ada 2 instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan secara langsung kualitas air sungai dan pengelolaan limbah industri. Pemantauan secara langsung untuk mengetahui tingkat kualitas air sungai

biasanya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat, dan pemantauan secara langsung untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan limbah industri biasanya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah sam contoh, pemantauan secara langsung untuk mengetahui tingkat kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat melalui Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum yang dalam teknisnya diantaranya pernah bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Keairan Balai Lingkungan Keairan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air pada tahun 2010.

Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat hanya berwenang mengumpulkan data hasil penelitian kualitas air sungai sebagaimana dipaparkan di atas, sedangkan yang berwenang menetapkan kondisi sungai tercemar berat, tercemar sedang, atau tercemar ringan berat pada BPLHD Provinsi Jawa Barat. d) Mekanisme Non Litigasi dan Litigasi Mekanisme Non Litigasi dimulai dengan langkah-langkah penhthlukan berupa pemberian sanksi administratif. Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan : (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepeth penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika thlam pengawasan ditentukan pelanggaran terhadap izin lingkungan; (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tentulis, b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, d. pencabutan izin lingkungan. Lebih lanjut Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha thn/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 lebih menegaskan lagi, bahwa penjatuhan sanksi administrative tersebut tidak





membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tanggungjawab pemulihan dan pidana. Jika langkah-langkah pendahuluan melalui pemberian sanksi administratif ternyata tidak efektif, maka dapat dilanjutkan melalui upaya Non Litigasi yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang tujuannya menemukan solusi melalui upaya perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran; c. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan d. tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup; (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan, menyatakan bahwa isi kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dapat berupa antara lain: 1) Bentuk dan besarnya ganti kerugian; Melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kedua hal tersebut merupakan upaya pendekatan ekonomi dan ekologi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Jika segala daya dan upaya melalui upaya Non Litigasi tersebut masih tidak membuahkan hasil (gagal), maka sengketa tersebut dapat diteruskan melalui mekanisme Litigasi di Pengadilan, sebagai contoh sebagaimana dalam berkas perkara yaitu hidup yang tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang diwakili oleh sdr. Wang Dong Bing. Existing Condition

Pengelolaan Industri Terintegrasi di Jawa Barat.

Pengelolaan Industri Terintegrasi dimaknai sebagai pengelolaan industri yang diintegrasikan dengan prinsip, kaidah, dan norma yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya air, kesehatan, lingkungan sosial, budaya, dan pemanfaatan teknologi. Sebagai perwujudan komitmen pihak perusahaan (industri) yang selain berkewajiban melakukan Mitigasi Fisik juga berkewajiban melakukan Mitigasi Sosial.

Dalam konsep Pengelolaan Industri Terintegrasi (PIT) adanya komitmen pihak perusahaan (industri) untuk menerapkan ISO 14000 bidang lingkungan hidup sangat penting, karena pelaksanaan dan komitmen tersebut penting untuk mendukung terjaminnya pelaksanaan Mitigasi Fisik dan Mitigasi Sosial. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan penilaian atas kinerja perusahaan-perusahaan (industri) dalam pengendalian pencemaran terkait limbah cair industrinya, yang dituangkan dalam Hasil Proper Periode 2011-2012. Dalam Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa urusan bidang lingkungan hidup menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas, efisiensi, dan

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara konsentrasi adalah Pengawasan pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui mekanisme PROPER.

PROPER adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Program PROPER



bertujuan untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency). Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri atas: 1) Kriteria ketaatan thiam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam 2) Kriteria penilaian aspek lebih dan yang dipersyaratkan (beyond compliance) untuk pemeningkatan hijau dan emas. Mulai tahun 2010-2011 Pemerintah Propinsi mulai dilibatkan dalam kegiatan PROPER dengan supervisi dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari mulai tahun 2011-2012 Pemerintah Provinsi diberi kewenangan sampai pada pemberian peringkat Biru, Merah dan Hitam Peserta PROPER untuk periode 2011-2012 secara nasional adalah sebanyak 1317 industri dan yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 185 industri sedangkan jumlah industri yang menjadi kewenangan penilaian BPLHD Prov.Jawa Barat adalah sebanyak 104 industri. Sebagian besar peserta PROPER dari Jawa Barat berasal dari industri tekstil, makanan dan minuman. Energi geothermal dan pelapisan logam.

Hasil penilaian PROPER periode 2011-2012 untuk industri di Jawa Barat dan 187 industri adalah sebagai berikut: 1) 5 industri meraih peringkat Emas; 2) 22 industri meraih peringkat Hijau; 3) 121 industri meraih peringkat Biru; 4) 28 industri meraih peringkat Merah 5) 5 industri meraih peringkat Hitam. 6) 3 industri peringkatnya tidak dikeluarkan. Hasil penilaian PROPER tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan pemerintah untuk kesungguhan dari pihak perusahaan untuk mendorong dan membina perusahaan (Industri) dalam melakukan Mitigasi Fisik. Bagaimana dengan kondisi pelaksanaan Mitigasi Sosialnya.

Tolok ukur pelaksanaan Mitigasi Sosial dijalankan melalui program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan

saat ini disebut dengan istilah corporate Social Responsibility (CSR). Acuan tentang Corporate Social Responsibility(CSR) berstandar internasional terdapat dalam ISO 26000. Dasar Hukum Pelaksanaannya di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat, sebagai berikut: 1)UU No. 40 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 2) PP No 47/2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP); 3)UU No. 19/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BIJMN; 4) Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL; 5) Perth Prov Jabar No.0212013 :TJSLP PKBL di Jabar; 6) Pergub No.30/2011 Tentang Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Jabar; 7) Keputusan Gubernur No. 5361Kep.791/Bapp/-2011 : Tim Fasilitas TJSLP di Jabar; 8) Kep Gub No. 5361 Kep.792/Bapp/-2011 : Duta CSR Jbr (3Tahun). Komponen Penyangga Sinergi Program CSR di Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: 1) Regulator (Pemerintah); 2) Mitra CSR Jawa Barat (BUMN, BUMD, Swasta); 3) Penenima Manfaat (Masyarakat); dan 4) Implementator atau Pelaksana (Perseroan Terbatas, Yayasan, Rumah Zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain). Maksud dan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) yaitu memaduselaraskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) serial Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan kalangan SWASTA. BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Jawa Barat, sedangkan tujuannya yaitu : 1)Sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan Pemerintah dan swasta melalui pengembangan CSR/PKBL dan memperluas Kemitraan Pembangunan di Jawa Barat; dan 2) Tercapainya akselerasi dan penguatan program CSR/PKBL di kalangan Swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh Pemerintah. Fokus sasaran CSR/PKBL di Jawa Barat diorientasikan untuk mendukung sukses pencapaian Tujuan MDG's di Indonesia, yaitu : 1) Memberantas kemiskinan dan





kelaparan 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan keintian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; 7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup; 8) Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global. Sasanan program CSR/PKBL di Jawa Barat. yaitu:

- 1). Bidang Pendidikan : a) rehab dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah; b) peningkatan sarana dan prasarana pengajaran c) peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik d) pemberian beasiswa;
- 2). Bidang Kesehatan: a)rehab dan ngunan sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas. poned); b) pengadaan alat kesehatan; c) peningkatan kualitas tenaga kesehatan; d) peningkatan kesehatan lingkungan: 3) Bidang Bina Lingkungan: a) pencegahan polusi dan penanaman pohon; b)penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan; c) mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim d) proteksi dan restorasi lingkungan; 4) Bidang Peningkatan Daya Beli (Ekonomi) : a) Peningkatan Multiaktivitas GEMAR (Gerakan (Gerakan Agribisnis); b) GAPURA (Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan); c) GEMPITA (Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional); d)Pengembangan KUMKM: 5) Bidang Infrastruktur Kota dan Desa: pembangunan jalan, rumah tinggal layak huni (rutilahu), air bersih, sanitasi dan energi; 6)Bidang Pengembangan Lainnya : sosial, industri, PSDA, dan lain-lain. Kondisi capaian fasilitasi CSR/PKBL JABAR Tahun 2012 : 1) Bidang pendidikan, rencana : 1000 RKB, realisasi :228 RKB berasal dan 45 perusahaan (BUMD, BUMN, Swasta); 2) Bidang kesehatan, rencana : 50 puskesmas poned, realisasi : 9 unit puskesmas poned di Jatiwangi Kabupaten Majalengka berasal dari PT BANK BJB: 3) Bidang pohon realisasi : penanaman 100.000 pohon sepanjang sungai citarum (BUMN KARYA). Nilai proyek CSR-PKBL di Jabar tahun 2011-2 12 dan 45 perusahaan yang telah menyampaikan informasinya, dengan jumlah CSR di Jabar 137 milyar rupiah. dan

CSR dalam bentuk indirect sebesar 429 milyar rupiah, sehingga total CSR/PKBL Jabar tahun 2011-20 12 ekuivalen sebesar 566 milyar rupiah. Dengan capaian CSRIPKBL Jawa Barat tersebut, Gubernur Jawa Barat mendapat penghargaan. diantaranya sebagai berikut : 1) CSR Award untuk Gubernur Jawa Barat pada acara The Indonesian CSR Summit 2011, 2012, 2013; 2) 25 apresiasi/cinderamata dan kunker provinsi lainnya; 3) web.csr-jabar.com 4) SR For Indonesia Sustainability' A ward 2011, Gubernur Jawa Barat menginisiasi terbentuknya model fasilitasi CSR, berhasil mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. bekerjasama dengan perusahaan Melalui CSR, Pola Kemitraan ini mulai banyak ditiru oleh daerah-daerah lain untuk mengembangkan kondisi kesejahteraan masyarakat; 5) The Indonesian CSR Summit 2012, Gubernur Jawa Barat telah berjasa mengembangkan Kemitraan Strategis dengan perusahaan dalam Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat Untuk Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan; 6) Konferensi Nasional CSR Tahun 2013, Gubernur Jawa Barat menginisiasi terbentuknya model fasilitasi CSR, berhasil mengembangkan CSR Jabar sebagai model Forum CSR yang ditiru karena melalui forum ini perusahaan bersinergi dalam pembangunan daerah, tidak ada penggalangan dana tetapi perusahaan didorong untuk melaksanakan sendiri pada Daerah pemangku kepentingannya. Walaupun diakui bahwa pelaksanaan CSR memperlihatkan adanya kemajuan, namun manfaatnya masih belum difokuskan pada masyarakat di sekitar DAS yang sara faktual setiap saat berpotensi terkena dampak dari terjadinya pencemaran sungai oleh industri. Selain dari itu, masih terdapat perbedaan pandangan tentang cara menerapkan CSR antara pihak perusahaan (industri),pemenintah, maupun masyarakat. Sehingga data di lapangan masih menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan CSR perusahaan (industri) masih belum terintegrasi. Model Kolaborasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sungai Untuk 1% mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi di Jawa Barat.



Penelitian ini dilakukan untuk menyesuaikan paradigma peruntukan (fungsi) sungai tertentu, dan perumukan sara tradisional sebagai sarana pengairan dan kebutuhan keluarga menjadi juga sebagai sarana pembuangan akhir Limbah Cair Industri dalam mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi, serta mendorong lahirnya paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup. yaitu : hukum harus menyesuaikan terhadap karakteristik alam dan masyarakat suatu daerah yang secara faktual berbeda antara kondisi di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, dengan mengkonstruksi Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat (Comdev) dan Pengelolaan Industri Terintegrasi (PIT) di Provinsi Jawa Barat, sebagai sebuah resolusi konflik di Jawa Barat, sebagaimana diformulasikan path Gambar 2 sebagai mana terlampir. Penjelasan diagram tersebut. penelitian ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya keseimbangan kepentingan antara dunia usaha (industri), masyarakat, dan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar DAS di Jawa Barat. Dengan dilaksanakannya Mitigasi Fisik dan Mitigasi Sosial secara konsisten oleh pihak Perusahaan (Industri) yang difasilitasi oleh Pemerintah, maka Pemidanaan Korporasi dapat dihindari bahkan dikesampingkan (Depenatisasi). Dengan Mitigasi Fisik yang konsisten akan menghasitkan kondisi Sungai Bersih. dan dengan Mitigasi Sosial yang konsisten akan menghasilkan Masyarakat Sekitar DAS Sejahtera. Pihak perusahaan (industri) diuntungkan karena terhindar dari tuntutan masyarakat. dan bahkan pada akhirnya akan mendapat dukungan besar dari masyarakat. sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan (industri) untuk menjamin ketangsgungan proses produksi.

Masyarakat (stakeholders) juga diuntungkan. karena terhindar dari dampak pencemaran sungai serta mendapat stimulan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraannya. Pada akhirnya, Pemerintah pun diuntungkan, karena sebagian program pembangunan yang sudah dicanangkannya dapat terealisasi. Jika prinsip Semua Untung tersebut telah dipastikan dapat diterapkan, maka Konstruksi Model ini memperkenankan atau dapat

menerima kondisi depenalisasi ketentuan hukum pidana lingkungan hidup. Bertitik tolak dan paradigma baru Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Atur Diri-Sendiri (ADS) menggantikan paradigma lama yaitu Atur-Dan-Awasi (ADA) yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dewasa ini (Otto Soemarwoto, 200 t: 107-1 22).

Maka kegiatan sosialisasi basil penetitian ini menjadi penting dilakukan dalam rangka memberi dukungan positif untuk mewujudkan paradigma ADS tersebut Maksud dan paradigma ADS yaitu agar egoisme negatif yang anti lingkungan hidup dan anti sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif yang pro lingkungan hidup dan pro sosial. Dengan lain perkataan, paradigma ADS harus bersifat memberi insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro lingkungan hidup dan pro sosial, serta disinsentif untuk sikap dan kelakuan yang anti lingkungan hidup dan anti sosial. Perkembangan sistem ADS didorong oleh makin kuat dan luasnya tekanan masyarakat pada dunia industri untuk berlaku ramah lingkungan. Pendekatan ADS sejatinya dapat dipelopori oleh dunia industri (secara sukarela) serta didukung oleh masyarakat dan Pemerintah.

Adaptasi penerapan hasil penelitian dalam tataran kebijakan Pemerintah sebagai pihak regulator dan fasilitator mulai terlihat dengan digulirkannya Integrated Citarum Water Resources Management and Investmen Program (ICWRMIP,. ICWRM IP merupakan program pengetolaan sumber daya air terpadu di wilayah Sungai Citarum. Digulirkannya program tersebut membuktikan bahwa permasalahan pemanfaatan Sungai Citarum dengan segala dampaknya berkarakter lintas sektoral, mencakup keterpaduan pengelolaan, keterpaduan lingkungan, dan keterpaduan individu, melalui pendekatan bottom up dengan mendorong pengelolaan sumber daya secara multi sector serta multi disiplin, berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan, sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ICWRMIP memiliki 9 (sembilan)





kegiatan lintas sekiar, diantaranya : a) Kegiatan executing agency di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum b) Kegiatan project implementing unit yang terdiri dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lingkungan Hidup; c) Kegiatan roadmap coordination and management unit melibatkan Direktorat Pengairan dan Irigasi serta Bappenas, dimana Kementerian Pekerjaan Umum yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan ICWRMIP. Dalam pelaksanaannya kegiatan lintas kementerian tersebut bekerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Program ICWRMIP berorientasi pada pencapaian optimal Mitigasi Fisik dan Mitigasi Sosial secara simultan dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan Sungai Bersih dengan Prinsip Semua Untung.

Adaptasi penerapan hasil penelitian terhadap optimalisasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan Sungai Citarum Bersih diantaranya dengan digulirkannya Program Agroforestry dan Community Empowerment di bagian hulu Sungai Citarum. yaitu dalam rangka pemberdayaan, pemulihan kembali, penghijauan, serta pengelolaan limbah ternak sapi menjadi Biogas di kawasan hulu Sungai Citarum.

Ada 3 (tiga) faktor utama yang dapat mendorong pulihnya sumber air dari kawasan hulu DAS Citarum, yaitu : a) konsep budaya lokal; b) pertanian religius; dan c) kebersamaan. Ketiga faktor tersebut dilaksanakan (budaya) dengan pendekatan kultur Sungai Citarum. masyarakat sekitar hulu Sungai Citarum. Upaya tersebut, pada satu sisi yang memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta pada sisi yang lain turut menumbuhkan dan memajukan nilai tambah ekonomi masyarakat sekitar DAS. Untuk di bagian tengah DAS Citarum dilakukan melalui optimalisasi Manajemen Bendungan, berupa timbal balik dukungan terhadap upaya ketahanan sumber daya air di kawasan hulu dengan cara kawasan tengah

dapat mendukung pemulihan kawasan hulu DAS Citarum melalui pola subsidi hilir (pengguna air) untuk penataan dan kegiatan konservasi di kawasan hulu DAS Citarum. Adapun adaptasi penerapan hasil penelitian secara individual seperti yang dilakukan oleh Ketua Peneliti misalnya dengan mendirikan Lerthaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJ-PSLH-LP) melalui Akta Notaris Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.I.L, Nomor 2 tanggal 4 September 2013.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan  
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut di atas, akhirnya peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sungai untuk mewujudkan pengelolaan industri terintegrasi di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada prinsip Semua Untung. Fisik sungai dengan keseluruhan ekosistem biotik dan abiotik yang ada di dalamnya diuntungkan, karena sasaran dan konstruksi model ini mewujudkan Sungai Bersih terbebas dari pencemaran limbah cair industri. Perusahaan (industri) diuntungkan, karena konstruksi model ini mewajibkan kepada perusahaan (industri) memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berstandar internasional dan/atau minimal berstandar nasional Indonesia, sehingga air limbah industri yang dibuang ke sungai sudah dalam kondisi dapat ditoleransi oleh ekosistem sungai, yang pada akhirnya perusahaan terhindar dan tuntutan masyarakat. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) diuntungkan, karena dengan mitigasi fisik yang konsisten dan jujur menjadi terhindar dan dampak pencemaran sungai serta dengan mitigasi sosial yang tulus mendapat stimulan untuk mendorong tingkat kesejahteraannya. Pemerintah pun diuntungkan, karena sebagian program pembangunan yang sudah dicanangkannya dapat terealisasi, yaitu terjaganya kelestarian lingkungan sungai. terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar DAS, dan



terjaminnya kelangsungan proses produksi perusahaan (industri). 2. Konstruksi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sungai untuk mewujudkan pengelolaan industri terintegrasi di Provinsi Jawa Barat membolehkan kepada perusahaan (industri) untuk membuang air limbah industrinya ke sungal, dengan syarat perusahaan (industri) memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berstandar internasional dan/atau minimal berstandar nasional Indonesia, serta konsisten dan jujur dalam penggunaannya dengan mendapat pengasan dan pembinaan yang profesional dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, akhirnya peneliti mengajukan beberapa saran berikut:

1. Bagi perusahaan (industri), memiliki Instalasi Pengetolaan Air Limbah (IPAL) berstandar internasional dan/atau minimal berstandar nasional Indonesia haruslah dipandang sebagai kebutuhan, artinya tidak boleh dipandang sebagai beban. Akan lebih tepat dan bijak, jika biaya pengadaan dan biaya operasional penggunaan IPAL berstandar internasional dan/atau berstandar nasional Indonesia tersebut dimasukkan sebagai investasi perusahaan (industri) untuk jangka panjang, artinya biaya-biaya tersebut tidak dimasukkan sebagai biaya produksi. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka pihak perusahaan tidak akan terbebani oleh persoalan persaingan usaha yang biasanya berawal dari persoalan biaya produksi. Dalam kondisi seperti apapun, keberadaan IPAL berstandar internasional dan/atau berstandar nasional Indonesia, bagi perusahaan (industri) akan menjadi kebutuhan yang harus selalu ada dan berkinerja prima. Bagi masyarakat, ketika perusahaan (industri) mulai memahami dan mulai merealisasikan pentingnya dan/atau IPAL berstandar internasional, maka berstandar nasional Indonesia, maka diharapkan masyarakat turut mendukung upaya tersebut dengan cara tidak

membuang limbah domestik (limbah Pencemaran, rumah tangga, limbah kotoran ternak, dan lain-lain ke sungai. Ketika perusahaan (industri) sudah mampu berbuat benar dan bijak, tidak mencemari sungai lagi dengan limbah cair industrinya, maka masyarakat pun diharapkan mampu berbuat benar dan bijak, tidak membuang limbah domestiknya lagi ke sungai, supaya upaya mewujudkan Sungai Bersih tidak sia-sia. 3. Bagi Pemerintah, sebagai pihak regulator dan/atau fasilitator pembangunan, diharapkan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap kinerja perusahaan (industri) untuk memastikan dipatuhinya kewajiban menggunakan IPAL. Berstandar internasional dan/atau berstandar nasional Indonesia. Ketegasan dan kejujuran dalam menjalankan tugas tersebut sangat diperlukan, untuk memastikan perusahaan (industri) tidak lalai lagi.

#### 5. DAFTAR PLSTAKA

- Addinul Yakin, 1997, *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah, FH. Unpad, Bandung.
- Daryanto, 2004, *Masalah Pencemaran*, Tarsito, Bandung.
- Daud Silalahi, 2001. *Merodologi Penelitian Hukum-Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Indisipliner*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung.
- , 1996, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penega kan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Pengaturan Hukum Sumber Dura Air dan Lingkungan Hidup di indonesia*, edisi kedua, Alumni, Bandung.
- Etty Riani. 2012, *Perubahan Iklim dan Kehidupan Biota Akuatik Dampak pada Bioakumulasi, Bahan Berbahaya dan Beracun & Reproduksi*, IPB Press, Bogor.





- Harry Hikmat, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung
- Hefni Effendi, 2003, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan, Kanisius, Yogyakarta.
- H.R. Mulyanto, 2007, Sungai. Fungsi dan Sifat-sifatnya, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Indro Sugianto, 2013, Class Action, Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Setara Press, Malang.
- Supardi, 1994, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung.
- John Lock, Two Treatises of Government, 1690 dalam Harold H. Titus, et.al., Living Issues in Philosophy, alih bahasa: HM. Rasjidi, 1984, Persoalan-persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta.
- Jonny Purba, 2005, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Yayasan OBOR Indonesia, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 1986. Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik; Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa ini. Gramedia, Jakarta.
- J. Vredenburg, 1981. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta.
- Kaelan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat. Budaya Sosial, Semiorika, Sastra, Hukum dan Seni, Paradigma Yogyakarta.
- Kusnaka Adimihardja & Harry Hikmat, 2004, Participatory Research Appraisal Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Humaniora, Bandung.
- Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung.
- NHT Siahaan. 2004, Hukum, Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Ed. 2, Erlangga, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan. Jakarta.
- Arur Din, 2001. Arur Pengelolaan Bane Sendiri. Paradigma Lingkungan Hidup.
- Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2001, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rafael Edy Bosko, 2006, Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, ELSAM, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2011, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Sofmedia, Medan.
- Schhreckner, T.F., 1985, Political Economy of Environmental Hazards, Law Reform Commission of Canada, Ottawa.
- Suripin, 2001, Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, Andi, Yogyakarta.
- Wisnu Arya Wardhana. 2001, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi, Yogyakarta.
- Zoer'ain.i Djamil Irwan, 2003, Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas & Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta
- Perundang-undangan:**  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 4851). UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN Tahun 2004 No. 32). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (LN Tahun 1982 No.37, TLN No. 3225). PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.  
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  
PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Air.  
PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.  
PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  
PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengetolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).  
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin



Lingkungan.

Kepres No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.  
Kepmen No. KEP-02/MENKLWIJ 1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.  
Kepmen No. KEP-14/MENLIII/94 tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL.  
Kepmen No. KEP-42/IMENLHII 1/94 tentang Pedoman Umum Petaksanaan Audit Lingkungan.  
Permen Negara Lingkungan Hidup No.17

Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Permen Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Bersih.

Permen Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Permen Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan.

Lampiran 1:

Tabel 1. Kawasan Industri di Jawa Barat  
Sumber: Disperindag Prosinsi Jawa Barat, 2013.

NO	NAMA KAWASAN	NAMA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI	LOKASI	LUAS RENCANA (Ha)
		Plumbon Bangun Sejahtera. PT	Cirebon	85.00
1	Kawasan Industri Plumbon	Besland Pertiwi. PT	Purwakarta	1.300.00
2	KI Kota Bukit Indah	Kawasan Industri Kujang Cikampek. PT	Karawang	140.00
3	KI Kujang Cikampek	Maligi Permata Industrial Estate. PT	Karawang	446.00
4	Karawang International Industrial City (Maligi)	Indotaisci Indah Development. PT	Karawang	700.00
5	Kawasan Industri Indotaisci	Sumber Air Mas Pratama. PT	Karawang	500.00
6	Golden Industrial Park	Surya Cipta Swadaya. PT	Karawang	1400.00
7	Surya Cipta City Of Industry	Mandala Pratama Permai. PT	Karawang	237.50
8	Mandala Pratama Permai	Karawang Jabar Industrial Estate. PT	Karawang	506.00
9	Karawang Jabar Industrial Estate	Mitra Karawang Jaya. PT	Karawang	430.00
10	Kawasan Industri Mitra Karawang	Kawasan Dharma Industri. PT	Bekasi	18.00
11	Kawasan Dharma Industri	Kawasan Industri Jababeka. PT	Bekasi	1570.00
12	Cikarang Industrial Estate Jababeka	Hyundai Inti Development. PT	Bekasi	200.00
13	Bekasi International Industrial City	Lippo Cikarang Tbk. PT	Bekasi	1000.00
14	Lippo Cikarang Industrial	Gobel Dharma Nusantara. PT	Bekasi	52.00
15	Gobel Industrial Complex	East Jakarta Industrial Park. PT	Bekasi	320.00
16	East Jakarta Industrial Park (EJIP)	Megalopolis Manunggal Industrial Development. PT	Bekasi	1005.00
17	MM 2100 Industrial Town	Bekasi Fajar Industrial Estate. PT	Bekasi	200.00
18	Bekasi Fajar Industrial Estate	Menara Permai. PT	Bogor	60.00
19	KI Menara Permai	Cibinong Center Industrial Estate	Bogor	140.00
20	Cibinong Center Industrial Estate	Bogorindo Cemerlang. PT	Bogor	100.00
21	Kawasan Industri Sentul	Hexamas Atanaka Persada. PT	Bandung	37.00
22	Kawasan Industri Batujajar	Dwipapuri Abadi. PT	Sumedang	200.00



**PETA INDUSTRI  
UNGGULAN KAB./KOTA DI  
JAWA BARAT**



```

graph TD
    A([PERUSAHAAN (INDUSTRI)]) --> B([PENAMBAHAN FUNGSI SUNGAI (Sumber Konflik)])
    C([STAKEHOLDERS (MASYARAKAT)]) --> B
    B --> D((MODEL KOLABORASI COMDEV & PIT JABAR))
    D --> E[MITIGASI FISIK]
    D --> F[MITIGASI SOSIAL]
    E --> G([DEPENALISASI])
    F --> G
    G --> A
    G --> C
  
```

PERUSAHAAN (INDUSTRI)

PENAMBAHAN FUNGSI SUNGAI (Sumber Konflik)

STAKEHOLDERS (MASYARAKAT)

MODEL KOLABORASI COMDEV & PIT JABAR

MITIGASI FISIK

MITIGASI SOSIAL

DEPENALISASI

Model Kolaborasi Masyarakat (Comdev) dan  
di Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. Diagram Model Kolaborasi Pemberdayaan  
Pengelolaan Industri Terintegrasi (PIT) di Provinsi